

## ABDUL KAHAR MUZAKKIR: PERJALANAN INTELEKTUAL DAN AKTIVITAS POLITIK-KULTURAL, 1930-AN–1970-AN

Mutiah Amini  
Departemen Sejarah UGM  
mutiah.a@ugm.ac.id

### Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang biografi pemikiran Abdul Kahar Muzakkir, seorang tokoh penting dalam Sejarah Islam Indonesia, yang jarang hadir dalam historiografi Indonesia. Abdul Kahar Muzakkir merupakan salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian aktif dalam MIAI dan Masyumi. Abdul Kahar Muzakkir aktif dalam kegiatan politik sehingga pemerintah kolonial mencatat rekam jejaknya sejak ia berangkat ke Mesir untuk sekolah hingga kembali ke Indonesia. Sebuah pengawasan khusus pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh berpengaruh. Sepulang dari Mesir, Abdul Kahar Muzakkir aktif pula berkegiatan politik. Akan tetapi, selesai menjadi anggota BPUPKI ia tidak lagi aktif dalam bidang politik. Ia lebih memilih jalan sosio-kultural dalam menyampaikan gagasannya politisnya. Ia kemudian menjadi pendidik dengan pengangkatannya sebagai Kepala Sekolah Guru Muhammadiyah (kemudian menjadi Madrasah Mu'allimin) dan turut mendirikan Universitas Islam Indonesia dan menjadi rektor pertamanya. Berdasarkan riset sejarah yang dilakukan dengan memanfaatkan karya-karya sezaman dan memori, disimpulkan bahwa perubahan pemikiran Abdul Kahar Muzakkir dari politik ke sosio-kultural merupakan jawaban atas ketidaksetujuannya dengan perkembangan politik Islam pada awal kemerdekaan, sekaligus menunjukkan konsistensi pemikirannya tentang Islam. Islam bukan sekadar sebuah ideologi, melainkan sebagai sebuah panduan dalam kehidupan keseharian.

**Kata kunci:** Abdul Kahar Muzakkir, BPUPKI, dasar negara Indonesia, Masyumi, MIAI, Universitas Islam Indonesia

### Abstract

*This paper discusses the intellectual biography of Abdul Kahar Muzakkir, a significant figure in the history of Islam in Indonesia, who is often overlooked in Indonesian historiography. Abdul Kahar Muzakkir was a member of the Investigating Committee for Preparatory Work for Independence (BPUPKI) and was active in the political organizations MIAI and Masyumi. His political involvement began during his studies in Egypt, leading to close monitoring by the colonial government from the time he left for Egypt until his return to Indonesia. This special surveillance was targeted at influential Islamic figures. After returning from Egypt, Abdul Kahar Muzakkir continued his political activities. However, following his tenure with BPUPKI, he shifted away from politics and chose a socio-cultural approach to express his political ideas. Consequently, he became an educator, serving as the principal of the Muhammadiyah teacher training school (which later became Mu'allimiin) and co-founding the Indonesian Islamic*

*University, where he served as its first rector. Historical research utilizing contemporary works and memoirs concludes that Abdul Kahar Muzakir's shift from political to socio-cultural spheres was a response to his discontent with the early post-independence political developments of Islam. This shift also reflects his consistent view of Islam, not merely as an ideology but as a guide for daily life.*

**Keywords:** *Abdul Kahar Muzakir, BPUPKI, Indonesian state foundation, Masyumi, MIAI, Indonesian Islamic University*

## **PENDAHULUAN**

Nama Abdul Kahar Muzakir sebagai seorang pemikir Islam jarang hadir di dalam historiografi Indonesia. Ia hanya tercatat sebagai salah seorang anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan yang merumuskan dasar negara Indonesia yang baru merdeka bersama Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosjojoso, dan H. Agus Salim. Padahal, sebagai seorang pemikir Islam, ia aktif secara politik pada akhir masa kolonial, sebelum bertransformasi dalam aktivitas kultural pada awal kemerdekaan. Karena berbagai aktivitasnya, nama Abdul Kahar Muzakir tercatat dalam berbagai surat kabar dan majalah kolonial. Dalam salah satu resume surat kabar kolonial *Overzich van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche pers* No. 26, Abdul Kahar Muzakir disebut sebagai *Een nieuwe Islam-leider* atau seorang pemimpin baru Islam (“Een Nieuwe Islam-Leider,” 1937). Karena ketidakhadirannya dalam narasi sejarah Indonesia, orang lebih familier dengan nama Abdul Kahar Muzakkar, tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Sulawesi Selatan, yang namanya banyak tertulis dalam media massa era 1950-an. Surat kabar *de Volksrant* yang terbit di Amsterdam, misalnya, kurang cermat membedakan sosok Kahar Muzakir dan Kahar Muzakkar (“Opstand En Burgeroorlog Dreigen in Indonesië, Insubordinatie,” 1952).

Nama Abdul Kahar Muzakir kembali hadir dalam memori kolektif masyarakat Indonesia ketika pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar “Pahlawan Nasional” pada 8 November 2019 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TK Tahun 2019, 2019). Padahal, beberapa peneliti pernah melakukan kajian tentang Abdul Kahar Muzakir dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Trias Setiawati menulis biografi singkat Abdul Kahar Muzakir

ketika membuat kajian tentang Sejarah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mitsuo Nakamura, seorang antropolog yang banyak mengkaji tentang gerakan Islam modernis Muhammadiyah, menggambarkan sosok Abdul Kahar Muzakkir berdasarkan pengalamannya berkenalan secara langsung ketika melakukan riset organisasi Muhammadiyah di Kotagede (Nakamura, 2019). Selain itu, Lukman Hakiem menuliskan ketokohan Abdul Kahar Muzakkir bersama-sama dengan tokoh Islam lainnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo (Hakiem, 2012). Tulisan Trias Setiawati, Mitsuo Nakamura, dan Lukman Hakiem merupakan kajian awal dan belum mendiskusikan secara utuh perjalanan intelektual Abdul Kahar Muzakkir, aktivitasnya di bidang politik, yang selanjutnya beralih pada bidang kultural.

Melalui pembacaan awal terhadap penelitian terdahulu, tulisan ini lebih menempatkan sosok Abdul Kahar Muzakkir sebagai seorang tokoh Islam, akademisi, dan praktisi yang mempunyai posisi dan peran penting dalam sejarah Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun awal kemerdekaan hingga wafatnya. Oleh karena itu, pendekatan biografi intelektual merupakan cara untuk mendiskusikannya secara mendalam, baik aspek eksternal maupun internal, mengapa Abdul Kahar Muzakkir lebih memilih jalan pemikiran sosio-kultural pada akhir masa hidupnya. Dalam konteks ini, penulisan biografi pemikiran banyak dilakukan untuk mencermati langkah-langkah strategis seseorang dalam menentukan aktivitasnya (Lerissa, 1981).

Abdul Kahar Muzakkir hidup dalam tiga periode politik, yaitu masa pemerintahan kolonial, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Pada 1930-an, saat Abdul Kahar Muzakkir memulai pendidikan tingginya di Mesir merupakan periode ketika pergerakan nasional Indonesia tengah tumbuh dan saat pemerintah kolonial memberikan perhatian lebih pada arus perjalanan para mahasiswa dan aktivis. Salah seorang yang masuk radar pemerintah kolonial adalah Abdul Kahar Muzakkir karena kiprahnya di bidang pergerakan tercatat dalam surat kabar kolonial. Demikian pula pada masa penjajahan Jepang, surat kabar kolonial tetap memberitakan segala aktivitasnya. Surat kabar, antara lain, memberitakan aktivitasnya dalam Majelisul Islamil A'laa Indonesia (MIAI). Namun sayang, narasi

tentang Abdul Kahar Muzakkir mulai meredup pada awal kemerdekaan, terutama setelah pemerintah membubarkan BPUPKI. Artinya, di negara Indonesia yang baru merdeka, banyak tokoh cenderung menyingkir dari konstelasi politik yang belum stabil.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis melihat pemikiran Abdul Kahar Muzakkir sebagai seorang pemikir Islam yang cepat naik dan cepat pula menghilang dari panggung politik pada 1950-an. Penulis juga melihat transformasi Abdul Kahar Muzakkir ke panggung yang lain. Untuk itu, penulis menggunakan riset sejarah dengan memanfaatkan sumber sezaman, termasuk memori yang ditulis oleh Abdul Kahar Muzakkir serta wawancara dengan anggota keluarganya.

## **METODE**

Penelitian untuk menghasilkan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yang dimulai dengan penentuan fokus kajian dan pengumpulan sumber penelitian yang relevan (Garraghan 1955). Dalam pengumpulan sumber, pencarian dan pembacaan terhadap berbagai surat kabar kolonial yang termuat di dalam *delpher.nl* merupakan informasi awal yang penting. Terbukti, nama Abdul Kahar Muzakkir beberapa kali muncul di dalam surat kabar kolonial, seperti dalam *De Locomotief*, *De Preangerbode*, *De Indische Courant voor Nederland*, *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, maupun *Java Bode*. Selain itu, melalui surat kabar kolonial, nama Kahar Muzakkir juga beberapa kali ditemukan di dalam majalah *Suara Muhammadiyah*, mengingat ia merupakan salah seorang tokoh penting dalam organisasi tersebut.

Abdul Kahar Muzakkir juga beberapa kali memberikan ceramah dan membuat catatan kecil tentang aktivitas politik-kulturalnya. Oleh karena itu, dokumen yang menggambarkan secara langsung pemikiran dan aktivitas tokoh yang ditulis menjadi bagian penting di dalam pencarian dan pembacaan sumber (Nordholt et al 2008). Sumber-sumber yang terkumpul selanjutnya dilengkapi dengan wawancara dengan keluarga (Leavy 2011). Beruntung putri kelima Abdul Kahar Muzakkir, yaitu Siti Djauharoh, adalah seorang penulis aktif yang

mempunyai memori kuat tentang aktivitas sehari-hari ayahnya, termasuk perjalanan intelektual dan aktivitas politik-kultural Abdul Kahar Muzakkir.

Keseluruhan sumber yang terkumpul selanjutnya diinterpretasikan sesuai konteks waktu, dengan memberikan pemaknaan dan penjelasan atas setiap periode ketika tokoh yang ditulis beraktivitas (Kuntowijoyo 2008). Karena Abdul Kahar Muzakkir hidup di dalam tiga periode politik, yaitu akhir masa kolonial, periode penjajahan Jepang, dan periode awal kemerdekaan dengan pola pemerintahan yang berbeda, maka pola dari ketiga periode tersebut merupakan bagian penting dalam penjelasan perjalanan intelektual dan aktivitas politik-kultural Abdul Kahar Muzakkir. Selanjutnya, penyelarasan atas seluruh proses penelitian pada akhirnya dinarasikan sebagai sebuah tulisan yang utuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keluarga Abdul Kahar Muzakkir**

Sosok Abdul Kahar Muzakkir tidak dapat dilepaskan dari sebuah kampung di tenggara Kota Yogyakarta, yaitu Selokraman, Kotagede. Di sinilah keluarganya tinggal tempat ia menjalani masa kecil. Ayahnya, Kyai Haji Muzakkir, salah seorang ulama Masjid Gedhe Kauman Kraton Yogyakarta. Adik ayahnya, Kyai Haji Muhammad Munawwir, merupakan pendiri Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, pada 1911 (*Sejarah Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta*, 2016). Ibu Abdul Kahar Muzakkir bernama Khotijah, putri H. Mukmin, seorang pedagang asal Kotagede yang menjual pakaian perempuan di berbagai pasar tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di kota-kota di Jawa (Nakamura 1983). Dari garis ayah, kakek buyut Abdul Kahar Muzakkir adalah Kyai Hasan Besari, salah seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro, seperti kutipan berikut.

*Prof. Kahar Muzakkir verklaarde verder, dat hij tijdens zijn reis naar de conferentie van de Muhammadijah te Belatah (Posso) het graf te hebben bezocht van Imam Bondjol (held uit de Padri-oorlog; omstrek 1825 in West-Sumatra) in Peneleng, ca. 10 km van Menado en de graven van Kjahi Medjo, een strijdenoot van prins Diponegoro en Kjahi Hassan (guru van*

*Gusti Muhammad, zoon van de Sultan VII van Jogja). De laatste was de grootvader van Prof. Kahar Muzakkir (De Locomotief 1955).*

Artinya:

Prof. Kahar Muzakkir menyatakan bahwa dalam perjalanannya menghadiri konferensi Muhammadiyah di Belatah (Posso) ia mengunjungi makam Imam Bondjol (pahlawan Perang Padri; sekitar tahun 1825 di Sumatera Barat) di Peneleng, sekitar 10 km dari Manado dan makam Kjahi Medjo, kawan Pangeran Diponegoro dan Kjahi Hassan (guru Gusti Muhammad, putra Sultan VII Jogja). Yang terakhir ini adalah kakek buyut dari Prof. Kahar Muzakkir.

Catatan menyebutkan bahwa Abdul Kahar Muzakkir lahir pada 1908 (catatan lain menyebutkan 1907). Abdul Kahar Muzakkir mulai menjalani pendidikannya di SD Muhammadiyah Selokramanan, sebelum menempuh pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, seperti Madrasah Mamba'ul Ulum dan Pondok Jamsaren di Surakarta serta Pondok Krapyak (Yogyakarta) dan Pondok Termas (Pacitan). Sayangnya, tidak banyak catatan aktivitas pendidikan Abdul Kahar Muzakkir selama di madrasah maupun pesantren. Catatan lebih banyak ditemukan saat Abdul Kahar Muzakkir menempuh pendidikan tinggi di Mesir dan tumbuh sebagai seorang akademisi Islam.

Pilihan untuk menempuh pendidikan di Mesir tentu bukan tanpa alasan, terlebih pada 1920-1930 lembaga-lembaga pendidikan formal di Jawa tumbuh dengan pesat. Kesadaran bahwa pendidikan formal akan mengarah pada kehidupan sekuler memperkuat para ulama di Jawa untuk mengirimkan anak-anak mereka menempuh pendidikan di Timur Tengah, termasuk di Mesir. Tidak terkecuali keluarga Abdul Kahar Muzakkir, yang mengirimkannya bersama kakaknya, Makmur, menempuh pendidikan di sana (Nakamura 1983). Ditambah oleh saran gurunya K.H. Mukti, yang juga seorang tokoh Muhammadiyah, untuk meneruskan pendidikan di Saudi Arabia atau Mesir (Al-Rasyid 1975).

Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya ke pelimbanan juga. Peribahasa tersebut mungkin mewakili pribadi Abdul Kahar Muzakkir yang meskipun melanglang dunia tetap kembali ke kampungnya di Kotagede. Sebagai sebuah wilayah, Kotagede menarik dari sisi sosial maupun ekonomi. Nakamura mencatat bagaimana tradisi keagamaan berpadu dengan etos perekonomian

masyarakatnya, termasuk sistem kekerabatan antarkeluarga yang terbangun begitu erat. Mayoritas penduduknya hidup dari industri perak yang berkembang pesat sekalipun bahan baku perak berasal dari daerah lain. Industri perak yang berkembang pesat di Kotagede pada 1920-an tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kraton Yogyakarta, tetapi juga untuk para pejabat kolonial. Selain itu, di Kotagede tinggal para pedagang/saudagar sehingga tidak mengherankan jika kemudian lahir pengusaha perak dan saudagar, dalam periode yang sama, mengembangkan organisasi keagamaan Muhammadiyah (Nakamura 1983).

Berkembang pesatnya organisasi Muhammadiyah di Kotagede, salah satunya tidak terlepas dari peran Abdul Kahar Muzakkir. Hingga wafat pada 2 Desember 1973, ia banyak menghabiskan waktunya untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan (“Prof. KHA Kahar Muzakkir Pejuang Yang Ikhlas Dan Sederhana,” 1973; *Wawancara dengan Siti Djauharoh (anak ke-5), personal communication*, 2019).

## **B. Belajar di Mesir, Belajar Menjadi Pemimpin Islam Indonesia**

Abdul Kahar Muzakkir berangkat ke Arab Saudi bersama seorang kakaknya pada 1924 untuk haji dan menimba ilmu agama. Situasi yang tidak kondusif karena terjadi peperangan di Arab memaksanya pindah ke Mesir untuk meneruskan pendidikan di Universitas Al Azhar, kemudian Universitas Darul Ulum. Selama menempuh pendidikan di Mesir, berbagai surat kabar kolonial mulai menulis segala aktivitas. Hal ini merupakan bagian penting dari politik kolonial dalam merekam pemikiran para pemuda Indonesia di luar negeri. Masa itu Perhimpunan Indonesia, yang didirikan mahasiswa dan pelajar Indonesia di Belanda, gemanya sampai ke Mesir. Kesadaran kebangsaan keindonesiaan tumbuh pesat sehingga pemerintah kolonial memandang penting untuk mengamati pergerakan para pelajar dan mahasiswa di luar negeri. Abdul Kahar Muzakkir aktif menjadi anggota asosiasi mahasiswa Indonesia di Kairo pada 1928. Melalui asosiasi tersebut ia menyatakan bahwa persatuan pelajar akan bergema di Indonesia. Para mahasiswa di Kairo mulai menggunakan nama “Indonesia” daripada Hindia Belanda. Bahkan, pada 1929 ia menganjurkan propaganda demi mencapai kemerdekaan Indonesia.

*Uit Cairo schrijft Abdul Kahar Moezakkir, dat Indonesië en de Indonesische beweging in het buitenland nog niet voldoende bekend zijn. Daarom bepleit hij de propaganda en juicht het toe, dat de P.P.P.K.I. besloten heeft de P.I. als voorpost te beschouwen. In de Islam-landen moet meer dan in Europa propaganda worden gemaakt, waar vele Moslimvolkeren eveneens naar hunne onafhankelijkheid streven. Daarvoor is het uitgeven van bladen in het Arabisch noodzakelijk* (“Indonesië, Malakka En Siam,” 1928).

Artinya:

Abdul Kahar Moezakkir menulis dari Kairo bahwa Indonesia dan gerakan Indonesia belum cukup dikenal di luar negeri. Itu sebabnya dia menganjurkan propaganda dan menyambut baik fakta bahwa P.P.P.K.I. PI telah memutuskan untuk dianggap sebagai pos terdepan. Propaganda harus lebih banyak dilakukan di negara-negara Islam dibandingkan di Eropa, dimana banyak masyarakat Muslim juga berjuang untuk kemerdekaannya. Hal ini memerlukan penerbitan majalah dalam bahasa Arab.

Meskipun berada di Mesir, Abdul Kahar Muzakkir tidak hanya *concern* memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga peduli dengan perkembangan Islam di tanah air. Setelah menyimak jalannya Kongres Kristen se-dunia di Yerusalem pada April 1928, ia mengkritik pernyataan utusan Kristen Hindia Belanda yang mengatasnamakan mewakili penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam tulisannya pada 19 April 1928.

Kalau keempat toean ini di dalam Congres itoe berboeat dan berlakoe oentoeke keperloean zending Christen di Indonesia meloloe, itoelah mereka empoenja hak dan wadjib, tetapi sangat menesallah hati kami, kalau kiranja dalam soeatoe internationaal Congres jang seroepe itoe mereka mengibarkan-kibarkan bandaira Indonesia, atau berlakoe atas nama Indonesia, jang lebih dari 90 perCent pendoedoeknja terdjadi daripada kaoem Moeslimin itoe (“Congres Christen Di Bait-al Makdis Menimboelkan Pergontjangan Hati Doenia Islam!,” 1928).”

Bersama beberapa temannya, Abdul Kahar Muzakkir membidani pembentukan Perhimpunan Indonesia Raja (PIR) di Kairo pada 1933 serta menjadi ketuanya. Perhimpunan ini berjaringan dan bekerja sama dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. PIR mendirikan kantor berita *Indonesia Raja*, sebuah kantor berita yang turut menyiarkan tuntutan Indonesia Merdeka ke masyarakat di Timur Tengah setelah dukungan yang sama menguat di Indonesia (Setiawati 2007). Ia juga

menjadi anggota Jamiyah Chairiyah Jawiyah, sebuah perkumpulan pemuda Indonesia, termasuk pemuda Melayu, yang ada di Kairo untuk menegakkan Islam (“Nieuwsbladen En Periodieken in de Buitengewesten, Noord-Sumatra-Bladen” 1930).

Tidak hanya belajar dan berorganisasi, Abdul Kahar Muzakkir mengasah kemampuannya menulis dengan menjadi jurnalis. Dengan demikian, ia memiliki kesempatan lebih luas dalam menyebarluarkan berita jika bangsa Indonesia sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Untuk itu ia aktif menulis di berbagai surat kabar, antara lain *Al-Ahram*, *Al-Balagh*, *Al-Fatayat*, dan *Al-Hayat* (Al-Rasyid 1975). Melalui pemberitaan ini, masyarakat dunia terutama mereka yang berada di Timur Tengah mendapatkan informasi penting tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di Indonesia dan luar negeri.

Karena aktif menulis, pada 1936 Sayid Mohammed Ali At-Thahir, seorang tokoh dan pejuang Palestina, meminta Abdul Kahar Muzakkir menjadi staf redaksi surat kabar *Atsturah* (Pemberontakan). *Atsturah* merupakan surat kabar Mesir yang berhaluan progresif, terutama dalam membangun kesadaran melawan kolonialisme di Asia dan Afrika. bersama teman-temannya, ia mendirikan kantor berita Indonesia Raya yang berperan memasok berita untuk surat kabar di negeri Arab dan Indonesia (“Prof. KHA Kahar Muzakkir Pejuang Yang Ikhlas Dan Sederhana,” 1973). Karena perjuangan tersebut, organisasi Islam di Hindia Belanda menunjuknya sebagai wakil dalam Kongres Besar Islam di Palestina pada Desember 1931 (“De All Islam in Atjeh,” 1931).

Khusus untuk organisasi Muhammadiyah, Abdul Kahar Muzakkir berusaha memperkenalkannya di luar negeri, sehingga memperluas jaringan organisasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta pada 1934, memutuskan bahwa jaringan komunikasi yang telah terbangun menjadi jalan bagi Muhammadiyah untuk memperoleh dukungan internasional. Hasilnya, beberapa negara dan organisasi Islam di Arab Saudi, Irak, Mesir, dan Turki mulai mengenal Muhammadiyah (“Indonesische Studenten in Cairo,” 1934). Segala pengalaman dan aktivitas organisasi, politik, dan sosial tersebutlah yang kemudian menjadikan Abdul Kahar Muzakkir sebagai seorang pemikir Islam yang kritis.

Setamat pendidikan tinggi di Mesir Abdul Kahar Muzakkir pulang ke tanah air pada 1937. Tentang kepulangannya ke Yogyakarta, surat kabar kolonial memberitakannya pada 21 Juni 1937 (“Een Nieuwe Islam-Leider,” 1937). Pemberitaan seperti ini tidak lazim pada masa itu, kecuali surat kabar kolonial menempatkan objek berita merupakan tokoh yang dianggap penting.

Setelah kembali ke Indonesia seuasi menamatkan pendidikan tingginya, Muhammadiyah memberikan kepercayaan kepada Abdul Kahar Muzakkir sebagai Direktur Madrasah Muallimin Yogyakarta. Harapannya, ia dapat membagikan ilmu dan pengalamannya demi kemajuan pendidikan kader Muhammadiyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada 1937, panitia kongres meminta Abdul Kahar Muzakkir untuk menyampaikan pidato tentang kaum muda dan Islam kepada generasi muda perempuan Muhammadiyah. Di hadapan para anggota Nasyiatul Aisyiyah, ia menyampaikan pidato berjudul “*Wat de Islam van de jeugd verwacht?*” (Harus bagaimanakah pemuda Islam?) (“Moehammadijah” 1937).

### **C. Membangun Ruang Politik**

Jalan politik Abdul Kahar Muzakkir terbentuk sejak menempuh pendidikan di Mesir, yang kemudian memengaruhi pemikiran dan ketertarikannya pada dunia politik di Indonesia. Di samping berkegiatan pendidikan dan sosial-keagamaan, untuk kegiatan politik ia bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Konflik internal akibat perbedaan pendapat antaranggota serta orientasi pemikiran politik yang mulai beragam membuat PSII terpecah pada 1938-an. Sebagian anggota membentuk Partai Serikat Indonesia (PSI). Sebagian lainnya membentuk Partai Islam Indonesia (PII) yang beranggotakan para nasionalis terpelajar, termasuk Abdul Kahar Muzakkir (Pringgodigdo 1994).

Keterlibatan Abdul Kahar Muzakkir dalam PII tercatat dalam surat kabar *Darmokondo* terbitan 6 Desember 1938. *Darmokondo* menulis berita tentang Dr. Soekiman memimpin rapat pembentukan PII, yang antara lain dihadiri Dr. Soekardi Rosyidie, Wali Al Fatah, Dasoeki, R.M. Wiwoho, Faried Makroef, Mr. Kasmad, Abdul Kahar Muzakkir, K.H. M. Mansoer, Kyai H. Hadikoesoemo, dan H.A. Hamid (“Een Nieuwe Islamietische Partij,” 1938). Dalam periode tersebut,

PSII maupun PII telah menyiapkan berbagai agenda politik untuk kemajuan umat dan organisasi. Namun, agenda utama dan kegiatan politik terhenti saat pemerintah kolonial mengeluarkan maklumat keadaan persiapan perang menghadapi invasi Jepang pada 1940-an. Kondisi itu memperlihatkan bahwa partisipasi Abdul Kahar Muzakir dalam organisasi politik tidaklah lama, hanya dalam kurun tiga tahun (1938–1940).

Abdul Kahar Muzakir aktif pula dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), sebuah gabungan organisasi Islam pada akhir masa kolonial. Sosok Abdul Kahar Muzakir dikenal kalangan luas, yang merepresentasikan dirinya sebagai tokoh penting PII. Ketika komunitas muslim di Tokyo mengundang MIAI untuk berpartisipasi dalam Pameran Islam di Tokyo dan Osaka pada 5–29 November 1939, Abdul Kahar Muzakir termasuk salah seorang yang mewakili MIAI. Ia mengunjungi Tokyo bersama beberapa tokoh MIAI lainnya, yaitu R.H.M. Farid Ma'roef, Abdullah bin Oesman Alamoedi, Wondoamiseno, Oemar Hoobeis, Mahfoed Sidiq, dan Mr. Kasmat (“De M.I.A.I. Naar Japan,” 1939).

Panggung lain tempat Abdul Kahar Muzakir melaksanakan kiprah politiknya adalah BPUPKI dan tim perumus dasar negara Indonesia (Panitia Sembilan). Di sini Abdul Kahar Muzakir tidak mewakili organisasi/partai politik, tetapi mewakili organisasi Muhammadiyah. Dalam Panitia Sembilan, Abdul Kahar Muzakir bersama Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, K.H. A. Wachid Hasyim, Mr. Achmad Soebardjo, Abikoeso Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim berhasil merumuskan dasar negara sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta (Eslon, 2015).

Historiografi Indonesia mencatat perdebatan panjang dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Abdul Kahar Muzakir dan K.H.A. Wahid Hasjim mengusulkan pentingnya hukum Islam masuk di dalam dasar negara, yaitu dengan mencantumkan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Usulan tersebut mendapatkan penentangan dari sebagian anggota BPUPKI—yang telah berubah menjadi PPKI—karena di Indonesia terdapat beberapa agama. Sebuah kondisi yang sulit untuk mengompromikan keragaman etnis, wilayah, dan agama seluruh penduduk Indonesia di dalam sebuah

dasar negara. Dengan kesadaran tinggi demi persatuan bangsa, para tokoh sepakat mengubah beberapa poin dalam Piagam Jakarta, yang kemudian ditetapkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 (Eslon, 2015).

#### **D. Dari Panggung Politik ke Panggung Kultural**

Kiprah Abdul Kahar Muzakkir dalam politik tidaklah lama karena ia memutuskan kembali fokus di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi Islam. Pada April 1943, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menginisiasi pembentukan panitia pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Sebagai ketuanya adalah Mohammad Hatta, yang dibantu wakil ketua Mr. Soewandi dan sekretaris Ahmad Ramli. Dalam kepanitiaan ini, Abdul Kahar Muzakkir menjadi anggota bersama K.H. Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Faturachman Kafrawi, K.H. Faried Ma'ruf, dan Kartosudarmo (Al-Rasyid, 1975).

Kerja panitia membuahkan hasil dengan peresmian STI pada 8 Juli 1945 dan pengangkatan Abdul Kahar Muzakkir sebagai rektor *magnificus* (luar biasa). Untuk menaungi STI dibentuk Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam (BPSTI), yang dipimpin Mohammad Hatta dan M. Natsir sebagai sekretaris. Berkampus di Gedung Imigrasi Jakarta Pusat, STI menerima mahasiswa untuk dua fakultas, yaitu fakultas agama dan fakultas ilmu sosial (Tashadi, 1986). Dalam periode yang sama, Mohammad Hatta menjabat Wakil Presiden, sementara M. Natsir menjabat Ketua Partai Masyumi. Kurang dari satu tahun pendidikan berlangsung di Jakarta, STI harus berpindah ke Yogyakarta mengikuti ibu kota dan pemerintahan Republik Indonesia yang juga harus berpindah pada 4 April 1946. Masa itu, Jakarta (Batavia) tidak aman bagi terselenggaranya pemerintahan, termasuk pendidikan, karena Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Bertempat di Dalem Pengulon, Presiden Soekarno meresmikan kembali pembukaan STI di Yogyakarta pada 10 April 1946. Penyempurnaan sistem pendidikan STI terus berlangsung hingga puncaknya mengubah STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 (Soefijanto, 2011). Peresmian UII berlangsung di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada 10 Juni 1948.

*Antara meldt, dat Maandagmiddag te Djokjakarta de „Universiteit Islam Indonesia” officieel werd geopend. Naar de heer Farid Maroef, het hoofd van deze universiteit, mededeelde, is de U.I.I. een voortzetting van de voormalige Sekolah Tinggi Islam (Islamitische hogeschool) te Batavia, welke werd opgericht door enige Islamitische leiders, waaronder de hr. Hatta. Op het ogenblik bezit de U.I.I. slechts vier faculteiten, namelijk godgeleerdheid, rechtskunde, economie en paedagogie, met 170 leerlingen en 30 leraren, onder leiding van de heer H. Abdoelkabar Moezakkir (“Islamitische ‘Vrije Universiteit’ Te Djokja Geopend,” 1948).*

#### Artinya

Antara memberitakan, Universitas Islam Indonesia resmi dibuka di Djokjakarta pada Senin sore. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Farid Maroef, pimpinan universitas ini, U.I.I. kelanjutan dari Sekolah Tinggi Islam di Batavia yang didirikan oleh beberapa tokoh Islam, termasuk Bapak Hatta. Saat ini, U.I.I. hanya empat fakultas, yaitu teologi, hukum, ekonomi, dan pedagogi dengan jumlah mahasiswa 170 orang dan guru 30 orang yang dipimpin oleh Bapak H. Abdoelkabar Moezakkir.

Peningkatan STI menjadi UII tidak mengubah jabatan Abdul Kahar Muzakkir karena ia tetap dipercaya menjabat sebagai rektor. Dengan begitu, ia menjadi rektor untuk dua masa jabatan, yaitu 1945–1948 (STI) dan 1948–1960 (UII). Untuk jabatan rektor UII berikutnya dipercayakan kepada Mr. Kasmat Bahoewinangoen (1960–1963), seorang ahli hukum lulusan Rijksuniversiteit te Leiden Belanda, yang bersama-sama Abdul Kahar Muzakkir aktif dalam PII dan MIAI (*Rektor UII Dari Masa Ke Masa*, 2024).

Selain pendidikan, Abdul Kahar Muzakkir memperhatikan kehidupan keagamaan di Indonesia. Ia bersama K.H. Wachid Hasyim menggagas pendirian kantor Jawatan Agama tingkat lokal (Shumuka) pada masa penjajahan Jepang (1944) (Boland 1971). Aktivitas dalam dunia pendidikan dan kehidupan keagamaan tidak menghalangi Abdul Kahar Muzakkir untuk tetap aktif di bidang politik. Ia tercatat pernah menjabat Ketua Partai Masyumi Cabang Yogyakarta, setidaknya hingga 1950 (Tashadi, 1986; Suwarno, 2015). Yogyakarta merupakan kota penting bagi Masyumi karena menjadi basis organisasi Muhammadiyah, salah satu organ pendukung Masyumi. Sayangnya tidak banyak catatan dan dokumen historis tentang aktivitas Abdul Kahar Muzakkir dalam kegiatan Masyumi, termasuk pemikiran-pemikiran politiknya. Pun ketika Masyumi menghadapi kontestasi politik pada Pemilu 1955 (Amini 2011).

## **E. Pemikiran Kultural Abdul Kahar Muzakkir**

Membaca ulang aktivitas Abdul Kahar Muzakkir di berbagai bidang, menjadi penting untuk melihat sosok Abdul Kahar Muzakkir dari sisi lain. Secara kasat mata terlihat bahwa Abdul Kahar Muzakkir konsisten berkiprah di beberapa area di tengah perubahan orientasi yang begitu cepat, seperti politik praktis, dakwah ajaran Islam, jalinan komunikasi internasional, serta penyebaran pengetahuan melalui pendidikan. Dalam era 1930-an–1950-an, ia begitu aktif dalam politik praktis, sementara pada era lain ia mengesampingkan kiprah tersebut dengan berkonsentrasi di dunia pendidikan. Dengan begitu seolah-olah Abdul Kahar Muzakkir tampak sebagai figur yang sangat cepat mengubah orientasi gerakan. Padahal, orientasi gerakan tersebut sejatinya merupakan refleksi kultural Abdul Kahar Muzakkir tentang Islam.

Dengan membaca tulisan-tulisan Abdul Kahar Muzakkir, kita akan mengetahui pemahaman ke-Islamannya. Islam bukanlah sebuah pemahaman awal tentang keimanan dan ibadah, melainkan Islam merupakan kesatuan dari seluruh ajaran dan tuntunan Rasulullah Muhammad saw. Abdul Kahar Muzakkir menegaskan hal tersebut dalam tulisannya di *Suara Masyumi* yang terbit pada 1956.

Islam sebenarnja bukanlah hanja berarti agama, jang kira artikan dengan kebiasaan definisi, bahwa agama itu adalah iman dan ibadat sadja. Memang beberapa agama diberi definisi sedemikian tadi, jakni keimanan, ibadah, upatjara<sup>2</sup>, pudja-pudjaan dan sebagainya. Akan tetapi, mengenai kepada agam Islam tidak dapatlah kita memberikan kepada Islam definisi jang tersebut tadi. Sebab Islam itu sebenarnja adalah bukan sahadja iman dan ibadat, akan tetapi sesungguhnya merupakan suatu peraturan, tuntutan dan pedoman hidup jg diturunkan dengan djalan wahju kepada Rasulullah Muhammad untuk didjalankan oleh seluruh ummat manusia, jang dapat mendjamin kebahagiaan hidup didunia dan hidup djalan acherat kelak (Muzakkir, 1956).

Kutipan tersebut menyiratkan bahwa pemikiran Abdul Kahar Muzakkir di panggung dakwah, baik melalui politik maupun pendidikan, merupakan bagian dari kesadaran kulturalnya tentang Islam. Bagi Abdul Kahar Muzakkir, untuk memahami Islam tidak hanya dengan memahami keimanan dan ibadahnya, tetapi harus memahaminya sebagai keseluruhan makna hidup. Hal itu mencakup pula

aturan, tuntunan, dan pedoman hidup yang diturunkan Allah Swt. melalui wahyunya kepada Rasulullah Muhammad saw.

Pemaknaan tentang Islam seperti penjelasan Abdul Kahar Muzakkir tersebut menjadi penting karena pada dasarnya Islam merupakan sebuah pedoman hidup dalam melangkah. Ia menjadi tuntunan sekaligus tuntutan orientasi hidup umat. Apabila Islam kemudian dipahami sebagai sebuah pedoman hidup, kesadaran tersebut akan mudah menumbuhkan kesadaran kultural dalam berperilaku. Islam merupakan kesatuan yang mencakup iman, ibadah, moralitas, ajaran, ideologi, negara, dan hukum, yang diimplementasikan di seluruh sendi kehidupan manusia (Nasution 1955).

Karena pemikiran Abdul Kahar Muzakkir tersebut, tidak mengherankan jika beberapa ahli mengkategorikan pemikirannya tentang nasionalisme sebagai sebuah nasionalisme religious (Hakim 2019). Artinya, sebuah pemahaman tentang kehidupan berbangsa yang dilandasi oleh ideologi ke-Islaman yang kuat dan utuh sehingga perjuangan membangun kemaslahatan bersama merupakan amanah agama, di samping panggilan dan tugas kemanusiaan serta kebangsaan. Ajaran agama merupakan sumber inspirasi dan moral luhur bagi nasionalisme yang menghasilkan sebuah negara merdeka dan berdaulat (Hakim 2019).

Dengan berpanduan pada prinsip-prinsip ke-Islaman yang terbangun sejak awal, Abdul Kahar Muzakkir kerap menghadapi tantangan-tantangan praksis. Prinsip hidup itulah yang terus mengiringi dan memandu Abdul Kahar Muzakkir dalam aktivitas di bidang pendidikan dan di masyarakat. Dalam menghadapi segala tantangan, Abdul Kahar Muzakkir menyikapinya dengan lemah lembut dan santun, sebagaimana pernyataan Buya HAMKA.

Apabila orang telah bergaul dgn almarhum Proffesor Abdul Kahar Muzakkir, yg akan lekat untuk selama<sup>2</sup>nya dalam hati orang dan kesan yg sukar utk dihapuskan ialah budinya dan kelemah-lembutannya.

Maka dgn budi pekertinya, dgn lemah lembutnya, dg senyum yg tersungging di bibirnya, dgn sikap hormatnya kepada tetamu, dgn penghargaanannya yg sungguh<sup>2</sup> kepada orang lain, dgn teguh setianya kepada teman<sup>2</sup> dan sahabat<sup>2</sup>nya, dia telah mendaulati hati orang (HAMKA 1973).

## **KESIMPULAN**

Abdul Kahar Muzakkir sebagai salah seorang tokoh pemikir Islam memiliki cara tersendiri dalam memaknai zaman. Ia memulainya dengan jalur politik pada akhir masa kolonial, yang berlanjut pada perjalanan panjangnya di dunia politik pada masa kemerdekaan. Sayangnya, friksi politik pada awal kemerdekaan Indonesia menguatkan langkahnya untuk fokus di bidang kultural. Ia mulai menjauh dari pusat kekuasaan dan memilih kampung halamannya, Yogyakarta, sebagai ruang untuk berekspresi dan berkkiprah. Dari Yogyakarta, Abdul Kahar Muzakkir tumbuh menjadi ulama nonpolitik serta lebih dikenal sebagai seorang pendidik dan ulama. Kondisi tersebut tentu saja memperlihatkan sebuah realitas yang menarik. Saat pemerintah kolonial mencatat arus migrasi Abdul Kahar Muzakkir sebagai seorang akademisi dan calon pemimpin masa depan dalam konteks pemikiran kolonial, pada perkembangannya ia menentukan jalan sebaliknya.

Abdul Kahar Muzakkir yang lebih memilih jalur kultural sebagai fase perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa ia merupakan tokoh politik yang berpikiran melampaui zaman. Ia tidak ingin terperjara dalam lingkup kekuasaan, sehingga ia lebih leluasa untuk menunjukkan jati dirinya. Sekalipun kemudian memilih jalur berbeda dibandingkan pada awal karier, ia sedang memperlihatkan konsistensinya dalam memahmi Islam. Bagi Abdul Kahar Muzakkir, Islam tidak sekadar sebuah ideologi, apalagi kekuasaan. Islam, dalam pemikiran Abdul Kahar Muzakkir, merupakan panduan untuk seluruh sendi kehidupan, melalui pemahaman kultural yang terus ia pertahankan secara konsisten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afgevaardigden van MIAI naar Japan. (1939). *De Indische Courant*, 2.
- Al-Rasyid, H. (1975). Mengenang Seorang Pejuang Bangsa: Almarhum Prof. KH. A. Kahar Muzakkir. *Muhibbah*, 4–5.
- Amini, M. (2011). Komunis di Kota Santri, Politik Lokal Kotagede pada 1950–1960an. : : *KITLV-NIOD-Yayasan Pusataka Obor Indonesia*.
- BOLAND, B. J. (1971). The Struggle of Islam in Modern Indonesia. *Brill*, 59. <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs4mn>
- Congres Christen di Bait-al Makdis menimboelkan pergontjangan hati doenia Islam! (1928). *Fadjar Asia*.

- De All Islam in Atjeh. (1931). *De Sumatra Post*, 2.
- De Locomotief*. (1955).
- De M.I.A.I. naar Japan. (1939). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 736.
- Djunanah (Director). (2020). *Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir, Mentari dari Boharen*. <https://www.youtube.com/watch?v=1RkRw08xvbs&feature=youtu.be>
- Een nieuwe Islamietische partij. (1938). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 827.
- Een nieuwe Islam-leider. (1937). *Dalam Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 425.
- Elson, R. E. (2009). Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945. *Indonesia* 88, 112–115.
- Garraghan, G. J. A. (1955). *A Guide to Historical Method*. Fordham University Press.
- Hakiem, L. (2012). *Menapaki Jejak Trio Ulama-Patriot: Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo dan K.H. Abdul Kahar Mudzakkir*. TablighMuTV. <http://www.tablighmu.or.id/2016/01/menapaki-jejak-trio-ulama-patriot-ki.html>
- Hakim, S. A. (2019). *Prof Kahar, Pahlawan Kita*. RMOL.ID. <https://rmol.id/read/2019/11/10/409539/prof-kahar-pahlawan-kita>
- HAMKA. (1973). Kenang-kenangan kepada: Proffesor Abdul Kahar Muzakkir. *Suara Muhammadiyah*, 3.
- Het Moehamaddijah Congres. (1937). *De Indische Courant*, II.
- Indonesië, Malakka en Siam. (1928). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisisch-Chineesche Pers*, 172.
- Indonesische studenten in Cairo. (1934). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 454.
- Islamieten naar Japan. (1939). *Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 2.
- Islamitische ‘Vrije Universiteit’ te Djokja geopend. (1948). *De Heerenveensche Koerier*, 1.

- Japan en de Islam, Afgevaardigden van Miao naar Tokyo. (1939). *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, IV.
- Japans Politiek en de Islam. (1940). *De Sumatra Post*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TK Tahun 2019 (120). (2019).
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Tiara Wacana.
- Leavy, P. (2011). *Oral History: Understanding Qualitative Research*. Oxford University Press.
- Lerissa, R. Z. (1981). *Biografi dalam Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesenjajaran*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Madinier, R. (2015). *Islam and Politics in Indonesia the Masyumi Party between Democracy and Integralism*. NUS.
- M.I.A.I. delegatie terug uit Japan. (1939). *Soerabaijasch Handelsblad*, II.
- Moehammadijah. (1937). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisch-Chineesche Pers*, 704.
- Muzakkir, Prof. A. K. (1956). Demokrasi memberikan saluran hukum bagi sesuatu ideologi, Islam adalah agama ideologi dan negara. *Suara Masjumi*.
- Nakamura, M. (1983). *The Crescent Arises over the Banyan Tree*. Gadjah Mada University Press.
- Nakamura, M. (2019). Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir dan Perkembangan Gerakan Islam Reformis di Indonesia. *Afkaruna*, 214.
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956–1959*. Pustaka Utama Grafiti.
- Nieuwsbladen en Periodieken in de Buitengewesten, Noord-Sumatra-bladen. (1930). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisisch-Chineesche Pers*, 268.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Opstand en burgeroorlog dreigen in Indonesië, Insubordinatie. (1952). *De Volksrant*, 11.
- Persatoean Indonesia. (1929). *Overzicht van de Inlandsche En Maleisisch-Chineesche Pers*, 311.
- Pringgodigdo, A. K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat.

- Prof. KHA Kahar Muzakir Pejuang yang Ikhlas dan Sederhana. (1973). *Suara Muhammadiyah*, 4–6.
- Rektor UII dari Masa ke Masa*. (2024). Universitas Islam Indonesia, Sejarah: Rektor. <https://www.uui.ac.id/profil/sejarah/rektor/>
- Sejarah Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta*. (2016). Almunawwir.Com. <https://almunawwir.com/sejarah/>
- Setiawati, T. (2007). *Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir Mutiara Nusantara dari Yogyakarta*. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
- Soefijanto, T. A. (2011). *Private Muslim Universities: A Consolidation in Progress* (2nd International Conference on Islam and Higher Education, pp. 14–16).
- Suwarno. (2015). Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, 1945–1960. *Patrawidya*, 417.
- Tashadi. (1986). *Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir: Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wawancara dengan Siti Djauharoh (anak ke-5)*. (2019). [Personal communication].